

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Presindo, Jakarta 1985.
- A'an Efendy dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika Jakarta, 2019.
- Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Angger Sigit Pramukti, dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustia, Yogyakarta, 2016.
- Armasito. Et.al, *Hukum Disabilitas Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2021.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mandar Maju Bandung, 2008.
- Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Setting Pendidikan Inklusi, KTSP*, Sleman, 2009.
- Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2007.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Coleridge Pete, *Pembatasan dan Pembangunan Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Djadja Rahardja, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, UD.Mapan, Yogyakarta, 2010.
- Enny Soeprapto, et.al, *Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan Dan Mekanisme Perlindungannya*, Vulnerable Groups, Yogyakarta: Pusham UII, 2012.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan*, Caet. 3, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.

- Harkristuti Hakrisno, *Hak Anak*, Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011.
- Jati Rinarki Atmaja, *Pendidikan Dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019.
- Jimly Asshiddiqie, *Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara*, Makalah dalam kegiatan Lokalkarya Nasional Komnas Perempuan, Jakarta, 2010.
- Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa Cendikia*, Bandung, 2019.
- Lutfi Ansori, *Legal Drafting, Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, PT RajaGrafindo Persada, Surabaya, 2018.
- M. Syahbuddin Latief, *Jalan Tentang Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 1999, Hal. 40.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PeradilanTata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, 2007.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan kedudukan dalam Hukum dalam Sistem Pradilan Pidana*, Alumni, Bandung, 2003.
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, PT Remaja Ros Dakarya, Bandung, 2009.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung PT. Refika Aditama, 2011.
- Nur Basuki Winanmo, *penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Ridwan HR, *Hukum, Admnistrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2018.
- S. Prjudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Suharizal, Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.

Sukamto Satoto, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Jambi, Fakultas Hukum, 2020.

Serlika Aprita, dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020.

W. Riawan Tjandra, *Hukum Adminitrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019.

B. JURNAL

Alia Harumdani Widjaja, et.al., “*Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, 2020. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1719>

Amar W, Fauzi S, Rustian M, “*Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Prespektif Peraturan Perundang-Undangan*”, Mendapo Journal Of Administration Law, Vol. 3, No. 3, 2022. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i3.18714>.

Ersa Y, Dhil's N, Rahayu R H, “*Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Dan Pengawasan Pertamina Shop*”, Mendapo Journal Of Administrasi Law, Vol. 3. No. 1, 2023. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i1.19455>

Iis Dwi S, Margi W, “*Implementasi Of Education Rights For Diffield Children At Special School In Semarang*”, Jurnal Civus, Volume 19, Nomor 1, 2019. <https://ejournal.upi.edu/index.php/civicus/article/view/25931>

Nurul A, Dian R A, “*Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Prespektif HAM & Pendidikan Islam di MINU Purwosari Metro Utara*”, Innovative Education Journal, Volume 2, Nomor 1, 2020. <https://attractivejournal.com/index.php/aj/article/view/37>

Titi S, Sutaryat T, Cahya S, “*Manajemen Pendidikan Inklusi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*”, Jurnal Ilmu Pendidikan, Volume 5 Nomor 3, 2022. <http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/513>

Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, Yulia Monita, “*Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*”, PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1, 2021.
<https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12685>

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LNRI Tahun 2014 Nomor 297, TLNRI Nomor 5606.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, LRNI Tahun 1989 Nomor 6, TLNRI Nomor 3390.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, LNRI Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI Nomor 4301.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan,

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, LNRI Tahun 1999 Nomor 165, TNLRI Nomor 3886.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, LNRI Tahun 2016 Nomor 69, TLNRI Nomor 5871.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, LNRI Tahun 2014 Nomor 244.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, LNRI Tahun 2014 Nomor 292.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, LNRI Tahun 2010 Nomor 23.

Provinsi Jambi. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perda Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 3.

D. INTERNET

Jogloabang, “Convention on the Rights of person with Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Preamble, CRPD”, diakses dari <https://www.jogloabang.go.id/>, pada tanggal 15 November 2022. Pukul 03.00 WIB.

<http://kbbi.web.id/perintah>, diakses pada tanggal 11 Juli 2022, Pukul 04.00 WIB.

<http://repository.uin-suska.ac.id/4186/3/9.%2011.pdf> Diakses pada tanggal 8 September 2022, Pukul 13.00 WIB.

Statistik Pendidikan Luar Biasa (PLB) 2019/2020 - Repositori Institusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemdikbud.go.id), diakses pada tanggal 11 Desember 2022, Pukul 20:50 WIB.